



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 15 Februari 2023/Periodik - 2022)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
UNIT KERJA : DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

I. DATA PRIBADI

1. Nama : EVAFAUZA YULIASMAN
2. Jabatan : KEPALA DINAS
3. NHK : 51388

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN **Rp. 2.870.000.000**

1. Tanah Seluas 358 m2 di KAB / KOTA PESISIR SELATAN, HASIL SENDIRI Rp. 410.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 460 m2/400 m2 di KAB / KOTA PESISIR SELATAN, HASIL SENDIRI Rp. 1.010.000.000
3. Tanah Seluas 10.000 m2 di KAB / KOTA PESISIR SELATAN, HASIL SENDIRI Rp. 610.000.000
4. Tanah Seluas 6.000 m2 di KAB / KOTA PESISIR SELATAN, HASIL SENDIRI Rp. 360.000.000
5. Tanah Seluas 5.355 m2 di KAB / KOTA PESISIR SELATAN, HASIL SENDIRI Rp. 160.000.000
6. Tanah Seluas 10.000 m2 di KAB / KOTA PESISIR SELATAN, HASIL SENDIRI Rp. 320.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN **Rp. 215.200.000**

1. MOBIL, TOYOTA KIJANG INNOVA Tahun 2015, HASIL SENDIRI Rp. 149.000.000
2. MOTOR, HONDA NC110 D CW AT (VARIO) Tahun 2008, HASIL SENDIRI Rp. 2.200.000
3. MOTOR, YAMAHA 2PK Tahun 2014, HASIL SENDIRI Rp. 9.000.000
4. MOBIL, DAIHATSU AYLA AYLA 1.2 RAT DLX Tahun 2018, HASIL SENDIRI Rp. 55.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA **Rp. 1.845.000**



D. SURAT BERHARGA	Rp.	----
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	210.878.936
F. HARTA LAINNYA	Rp.	----
Sub Total	Rp.	3.297.923.936
III. HUTANG	Rp.	141.500.000
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	3.156.423.936

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.